

Meninjau Gerakan Sosial Gender Islam di Dunia Blogosphere: Studi Website

mubadalah.id

Alif Jabal Kurdi

Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal

alifjabalkurdi@gmail.com

Abstrak

Dunia digital menjadi sarana baru bagi manusia untuk beraktivitas, berinteraksi dan bersosialisasi. Kehadirannya mendisrupsi berbagai macam aktivitas konvensional, termasuk penyebaran informasi. Konektivitas antar individu, di era digital saat ini, terjadi dan terjalin melalui website dan blog sehingga memunculkan sebuah dunia baru yang disebut blogosphere. Tidak hanya sekedar sebagai media yang menjadi tempat saling bertukar pendapat, blogosphere juga memberikan kesempatan bagi mobilisasi gerakan sosial yang membawa berbagai wacana, termasuk tafsir al-Qur'an. Artikel ini akan mendiskusikan fenomena gender-blogosphere sebagai sebuah gerakan sosial dengan mengambil website *mubadalah.id* sebagai objek penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori gerakan sosial yang memuat dua pasang komponen analisis yaitu sumber daya dan struktur mobilisasi serta pemingkasan dan kesempatan politik. Tulisan ini mencoba untuk melihat keunikan karakter gerakan sosial dari objek yang dikaji. Artikel ini menyimpulkan beberapa poin elaboratif sebagai hasil analisisnya. Pertama, teori gerakan sosial menjadi salah satu pendekatan yang menarik untuk membaca geliat narasi keagamaan di dunia digital. Kedua, pemanfaatan blogosphere oleh platform tersebut diinisiasi oleh motif yang merupakan bentuk pengejawantahan dari visi dan idealisme yang telah ditentukan. Ketiga, platform *mubadalah.id* memiliki kekhasan karakter yaitu cenderung bergerak pada upaya menghasilkan produk penafsiran yang siap pakai dan menekankan sisi aksiologisnya untuk mengubah peradaban melalui reformasi pemikiran serta melawan konstruksi pemahaman patriarkis yang masih menjamur di kalangan umat Islam di Indonesia. Artikel ini tidak hanya menawarkan sebuah cara baru dalam melihat geliat narasi keagamaan di ruang digital, namun juga menjadi prototype bagi desain-desain riset yang mencoba membaca fenomena sosial keagamaan di dunia digital dengan analisis teori gerakan sosial.

Kata Kunci: ***Gerakan Sosial, Gender Islam, Blogosphere, mubadalah.id***

Pendahuluan

Dunia digital menjelma menjadi dunia paralel dari dunia nyata. Hampir segala bentuk aktivitas di dunia fisik dapat dijumpai bentuk mayanya (e-version) di era saat ini. Sebagaimana halnya dengan aktivitas penyebaran informasi yang sebelumnya dilakukan melalui metode konvensional yang masih membutuhkan kertas sebagai medianya, kini telah berubah wajah dengan kehadiran log web atau blog (Woan, 2008: 477). Blog juga didefinisikan sebagai "internet website" yang menjembatani konektivitas antar individu yang memiliki kesamaan dan ketertarikan terhadap suatu isu ataupun topik.

Lebih jauh lagi, blog atau internet website mendisrupsi fondasi yang telah dibangun oleh paradigma jurnalisme tradisional (Pain, 2005: 5). Sebab blog ataupun website menyediakan ruang bebas berekspresi yang sebelumnya tidak ditemukan di dunia media konvensional. Sebagaimana dikutip oleh Sunny Woan dalam penelitiannya, bahwa di Amerika bahkan para blogger dianggap sebagai "the new powerbroker in American politics and cultures" yang turut andil bagi perubahan-perubahan sosial yang terjadi (Woan, 2008: 478). Dunia blog atau website yang diistilahkan dengan

"*blogosphere*", dengan demikian, mampu membuka ruang-ruang baru bagi sebuah gerakan sosial yang membawa visi serta misi tertentu.

Blogosphere dikarakteristikan sebagai "*gathering place that is clearly and openly outfitted with a giant microphone*" yang tidak hanya mewadahi kebebasan berekspresi serta saling tukar-menukar ide dan opini. Blogosphere juga menyediakan kesempatan untuk memperluas jejaring dan sosialisasi dengan jangkauan audiens yang tidak terbatas. Kemudahan akses dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kritik, serta menghimpun suara yang sama, memberikan tempat bagi blogosphere sebagai sarana baru bagi terbentuknya aktivisme dan demonstrasi yang merupakan bagian dari demokrasi partisipatif (Woan, 2008: 480).

Pada ranah studi Islam, kehadiran blogosphere memberikan angin segar bagi transformasi kajian-kajian Islam yang ingin melakukan *self-disruption* di tengah geliat dunia digital. Istilah "*Islamic-blogosphere*" menjadi term yang mewakili dinamika kajian Islam di tengah perjumpaannya dengan budaya serba digital. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *blogosphere* juga menyediakan sumber daya bagi gerakan-gerakan sosial yang menjadikan pemahaman Islam sebagai basis wacananya.

Maka artikel ini bertujuan untuk melihat kehadiran *Islamic-blogosphere* sebagai sebuah gerakan sosial yang terstruktur dan kolektif serta bertujuan untuk mewujudkan visi-misi perubahan sosial tertentu yang dicanangkannya. Objek studi artikel ini ialah platform literasi digital keagamaan (Islam) yang mengangkat diskursus gender sebagai *main topic*-nya, *mubadalah.id.*, dan selanjutnya akan dianalisis dengan teori gerakan sosial sebagai pendekatannya serta didiskusikan keterlibatannya dalam kontestasi otoritas.

Teori Gerakan Sosial/ Social Movement Theory

Generasi awal teori gerakan sosial mengadopsi cara pandang dalam tradisi fungsionalisme yang berfokus pada sebab struktural dan psikologis dari mobilisasi massa (Wiktorowicz (ed.), 2012: 47). Huntington (1968: 5), misalnya, berpendapat bahwa ketegangan sosial dan kekacauan politik terjadi akibat ketidakmampuan lembaga-lembaga mengakomodasi tuntutan-tuntutan baru masyarakat sehingga menghasilkan ketegangan struktural dan ketidakpuasan baru. Model klasik dalam pendekatan ini mengasumsikan adanya hubungan kausal antara ketegangan struktural dengan ketidaknyamanan psikologis, yang nantinya mengarah pada kemunculan tindakan kolektif.

Dalam kaitannya dengan aktivisme Islam, sebagian sarjana berpendapat bahwa aktivisme Islam lahir sebagai respon terhadap imperialisme budaya (Wiktorowicz (ed.), 2012: 52) (lihat lebih lanjut Burgat dan Dowell, 1993). Agama, kemudian, menjadi sarana solutif dalam menyelesaikan problem ketegangan yang semakin meningkat yang dengannya individu-individu dapat menjangkarkan kembali diri mereka serta mengatasi ketidakpuasannya (Esposito, 1992: 17). Namun arah sudut pandang yang dibawa oleh generasi awal pendekatan ini tidak mampu mengakomodir fakta-fakta lain yang terjadi di lapangan dan berjalan beriringan dengan dinamisasi konteks. Pendekatan tersebut dinilai terlalu simplistis dalam mengasumsikan bahwa ada hubungan yang pasti antara ketegangan struktural dan ketidakpuasan gerakan. Pasalnya tidak setiap ketegangan struktural menghasilkan gerakan sosial dan begitu pula sebaliknya (Wiktorowicz, 2012: 54).

Selain itu, model klasik dari pendekatan ini juga tidak mempertimbangkan dimensi-dimensi lain yang memicu terjadinya mobilisasi gerakan. Seperti halnya dimensi purposif, politik dan organisasi dari kontestasi gerakan, yang memperlihatkan bahwa sebuah gerakan tidak hanya berfungsi sebagai sebuah mekanisme alternatif dalam

pengelolaan psikologis (ketidakpuasan) namun lebih dari itu, sebuah gerakan juga bisa saja secara eksplisit difokuskan dan diarahkan pada wilayah kontestasi politik (Buechler, 1993). Implikasinya, para kontestan yang tergabung dalam gerakan-gerakan sosial bukanlah sekedar individu-individu yang mengalami “disfungsi” dan sedang mencari kenyamanan psikologis melainkan sangat berpotensi merupakan anggota masyarakat intelektual dan normal.

Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkup kasus yang tersedia semakin luas dan mengintegrasikan teori gerakan sosial ke dalamnya menjadi sebuah opsi yang menarik. Sebab bisa dikatakan bahwa di era digital saat ini terjadi perjumpaan antara agama dan media baru sehingga memantik asumsi bahwa aktivisme Islam mulai melirik dunia digital sebagai salah satu sumber dayanya (Campbell, 2013,: 57). Kontestasi wacana dalam gerakan sosial kontemporer tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas gaya komunikasi dan media baru yang menyertainya (Lim, 2018: 92), sehingga menjadi sebuah tantangan untuk mengaplikasikan teori gerakan sosial pada pembacaan atas gerakan-gerakan sosial kontemporer di media digital.

Namun sebelumnya, perlu ada uraian yang utuh atas komponen-komponen teoretis dalam teori gerakan sosial yang bisa dirangkum dalam dua cabang:

1. Sumber Daya dan Struktur Mobilisasi

Komponen teoretis pertama dari teori gerakan sosial ialah teori mobilisasi sumber daya (TMSD). Teori ini berupaya melihat suatu gerakan sosial sebagai sesuatu yang rasional dan suatu tindakan kolektif yang lahir dari melalui perencanaan yang terorganisir. TMSD membawa sebuah penekanan utama sebagai sebuah pendekatan yaitu bahwa gerakan tidak berjalan lurus dengan ketidakpuasan. Sebab sementara ketidakpuasan tersebar luas, gerakan tidaklah demikian. Maka harus ada variabel-variabel perantara yang menjadi penerjemah atas tiap-tiap tindakan yang mencerminkan ketidakpuasan sehingga terlihat sebagai sebuah pernyataan yang terorganisasi (Wiktorowicz, 2012: 56-57).

Implikasi dari penegasan utama TMSD sebagai sebuah pendekatan ialah bahwa sebuah ketidakpuasan kolektif memerlukan sumber daya dan struktur mobilisasi massa untuk menciptakannya. Organisasi-organisasi sosial yang formal menjadi kendaraan bagi keniscayaan terwujudnya ketidakpuasan kolektif, sebab tanpa itu maka sebuah ketidakpuasan hanya akan dipandang sebagai ketidakpuasan individual. Maka secara sederhana, TMSD melihat gerakan-gerakan sosial sebagai ledakan rasional yang tidak hanya ditujukan untuk meredakan ketegangan psikologis, melainkan sebagai suatu pernyataan yang terorganisir dan terstruktur melalui sumber daya strategis demi terwujudnya sebuah tindakan yang kolektif (Wiktorowicz, 2012: 57).

Pendekatan TMSD memiliki genealogi yang tidak terpisahkan dengan konteks masyarakat Barat. Rasionalitas dan strategi gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat demokratis liberal yang menjadi penekannya, merupakan warisan konteks kebudayaan Barat yang menjadi akar kelahirannya (Oberschall, 1973; Gamson: 1975; Tilly: 1978). Pada tataran realitas, sebuah gerakan sosial akan membentuk wadah bagi mobilisasi, mekanisme komunikasi dan staf-staf profesional yang didesain untuk menciptakan sebuah gerakan strategis yang dapat memaksimalkan dampak dan pengaruh dari sebuah aktivisme sosial. Dalam menjaga harmonisasi dan kontinuitas sebuah organisasi gerakan sosial, pengelola gerakan akan menawarkan *reward* maupun insentif tertentu baik untuk menjaga para aktor yang telah dimiliki maupun menarik aktor lain yang potensial.

Konsekuensi dari pernyataan pada rumusan di atas mengarah pada argumen bahwa gerakan-gerakan sosial yang matang dapat berkembang menjadi sebuah entitas

birokratis maupun bentuk politik yang terlembagakan. Pemanfaatan serta pengelolaannya terhadap sumber daya yang dimiliki menjadi elemen potensial yang dapat membawa sebuah gerakan sosial menjalankan aktivisme secara lebih masif. Pada kasus aktivisme Islam, Quintan Wiktorowicz memberikan gambaran yang menarik mengenai beberapa gerakan sosial Islam dalam memanfaatkan sumber daya organisasinya (Wiktorowicz, 2012: 58).

Ia mengulas beberapa kasus yang menggunakan pendekatan TMSD seperti masjid, misalnya, yang merupakan lembaga sentral bagi praktik keagamaan umat Islam. Masjid menjadi sumber daya strategis sebab di dalamnya tersedia sarana-sarana penunjang terciptanya sebuah gerakan sosial yang terorganisir. Khutbah, ceramah dan kelompok-kelompok studi memberi ruang bagi penyebaran pesan gerakan dan rekrutmen anggota baru serta terjalinnya jaringan organik maupun nasional yang menghubungkan komunitas aktivisme yang berasal dari berbagai tempat (Wiktorowicz, 2012: 58-59) (lihat juga: Parsa, 1989).

Selanjutnya, ada LSM-LSM Islam yang merupakan organisasi tingkat menengah yang bergerak di segala sektor, umumnya sosial-kemasyarakatan, dan membawa visi "Islam adalah jawaban" bagi persoalan sehari-hari masyarakat muslim. Aktivisme organisasi berbentuk LSM ini secara tidak langsung memperlihatkan wajah Islam yang aplikatif di ranah sosial serta memberikan wadah mobilisasi bagi pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas berbaju Islam di kalangan bawah. Lalu, dalam masyarakat sipil, aktivisme Islam terbentuk melalui asosiasi-asosiasi profesi maupun mahasiswa yang dimobilisasi sebagai gelanggang politik alternatif yang berafiliasi pada kecenderungan sosial tertentu. Kecenderungan yang dimaksud bisa pada upaya mendukung suatu pesan keagamaan tertentu maupun mengafirmasi suatu idealisme yang bersesuaian dengan motif gerakan sosial yang diusungnya (Wiktorowicz, 2012: 59-61) (lihat juga: Wickham, 1997).

Maka secara sederhana, ada beberapa poin utama yang ingin dieksplorasi oleh pendekatan TMSD. Pertama, motif di balik lahirnya sebuah gerakan sosial dan tawaran apa yang dibawanya sebagai pembanding. Kedua, mekanisme struktural yang dijalankan oleh suatu organisasi atau sumber daya sosial untuk mempertahankan solidarisme dan kontinuitas mobilisasi aktivisme sosialnya.

2. Budaya dan Proses Pembingkai (*Framing*) Serta Kesempatan Politik

Interaksi sosial, makna dan budaya menjadi faktor-faktor ideasional yang mendapatkan perhatian para teoretis gerakan sosial sejak 1980-an (Morris dan Mueller, 1992). Intensitas terhadap faktor ideasional ini kemudian memunculkan sebuah pendekatan yang disebut studi tentang pembingkai. Studi ini selanjutnya mengkaji suatu kolektivitas sebagai konseptualisasi diri yang dilakukan oleh individu-individu yang menjadi pesertanya, serta proses interaktif yang di dalamnya makna terproduksi, terartikulasi lalu tersebar (Wiktorowicz, 2012: 70).

Bingkai dapat dimaknai sebagai skema-skema yang menyediakan bahasa dan sarana kognitif untuk memahami pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa di "dunia luar". Bagi gerakan sosial sebagai agen-agen pemberi makna yang terlibat langsung dalam konstruksi sosial makna, skema-skema ini menjadi penting. Sebab skema-skema tersebut diperlukan untuk mengartikulasikan dan menyebarluaskan kerangka-kerangka pemahaman yang merangsang tindakan kolektif. Maka istilah "pembingkai" diaplikasikan untuk menggambarkan proses produksi makna yang melalui konstruksi sosial makna berdasarkan paradigma gramatikal dan lensa-lensa penafsiran yang menghasilkan makna antar-subjek dan, dalam hal ini, ditujukan untuk mempermudah tercapainya tujuan gerakan (William dan Benford, 2000).

Ada tiga fungsi utama pembingkaiannya bagi gerakan-gerakan sosial yang diidentifikasi oleh David Snow dan Robert Benford (1988: 200-204). Pertama, gerakan sosial berupaya mengonstruksi bingkai-bingkai yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi sebuah persoalan yang perlu ditangani (diagnostik). Kedua, aktivisme sosial selanjutnya mencoba memberikan pemecahan terhadap persoalan yang telah didiagnosis termasuk taktik dan strategi yang dibutuhkan (prognostik). Ketiga, gerakan sosial juga memberikan alasan-alasan dasar untuk memotivasi dukungan dan tindakan kolektif. Ketiga poin fungsi ini memperlihatkan bahwa pembingkaiannya memberikan konsepsi bagi gerakan sosial untuk mengarahkan mobilisasi massanya dari potensi menjadi aktual (motivasional) dan ini menjadi salah satu dimensi penting dari proses pembingkaiannya itu sendiri yang disebut sebagai resonansi bingkai (*frame resonance*).

Gema sebuah gerakan sosial ditengarai akan lebih efektif apabila bingkai yang digunakan bersandar pada sisi lokalitas budaya seperti simbol-simbol, bahasa dan identitas dari budaya yang diakomodasi. Namun konsistensinya sebagai narasi budaya tidak menjadi faktor penentu dari perluasan gema gerakan sosial, melainkan ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan seperti reputasi individu atau kelompok yang mengartikulasikan bingkai tersebut, relevansi personal antara bingkai dengan individu pembacanya, konsistensi bingkai dan kredibilitas empiris bingkai tersebut dalam kehidupan nyata (Benford dan Snow, 2000: 619-622)..

Kontestasi pembingkaiannya adalah suatu yang niscaya dalam pergumulan narasi-narasi gerakan sosial. Pertarungan antara sumber daya yang berupaya menghadirkan bingkai-bingkai alternatif dengan yang mempertahankan “bingkai-bingkai resmi” kerap kali terjadi dalam kontestasi pembingkaiannya (Noakes, 2000: 487-510). Di satu sisi upaya pembingkaiannya yang mengusung bingkai-bingkai alternatif berusaha menawarkan reformasi dan menyerukan perubahan-perubahan besar pada tatanan wacana yang selama ini dilanggengkan oleh “bingkai-bingkai resmi” yang didukung rezim tertentu. Di sisi lain, ada sumber daya lembaga yang dengan semarak meneguhkan “bingkai-bingkai resmi” sebagai sesuatu yang mapan dan ingin menjadikannya sebagai sebuah hegemoni tanpa kritik.

Proses perebutan wacana dengan melibatkan ragam proses pembingkaiannya ini tidak lepas dari apa yang disebut oleh Eickelman dan Piscatori (1996: 5) sebagai “politik Islam”. Sebab di dalamnya terjadi persaingan dan pertarungan untuk memperebutkan penafsiran atas simbol dan kontrol sosial atas berbagai lembaga, baik formal maupun informal, yang menghasilkan dan menopang mereka. Maka tidak heran jika masing-masing pihak yang berseteru selalu berupaya memenangkan kontestasi dan menjaga legitimasi serta status *quo* yang dimiliki.

Membaca Geliat Wacana Gender dan Islam Sebagai Gerakan Sosial

Ketidakpuasan terhadap rezim wacana menjadi salah satu faktor elementer yang memicu terjadinya mobilisasi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh teori gerakan sosial lama. Namun seiring berkembangnya pendekatan ini, ada asumsi teoretis bahwa mobilisasi sosial juga dapat terjadi dengan dipicu oleh dimensi purposif, politik maupun kontestasi gerakan yang menyebabkan sebuah gerakan sosial tidak lagi menjadi sekedar wadah bagi barisan patah hati, melainkan menjadi sebuah lokomotif dalam mendapatkan suatu tujuan pragmatis melalui kontestasi (Buechler, 1993). Maka, dalam hal ini, sebuah rezim wacana atau wacana resmi tidak harus dipahami terbatas pada wacana yang digulirkan oleh suatu rezim dalam politik resmi seperti pemerintah, namun sangat mungkin merupakan wacana-wacana yang telah terkonstruksi sebagai sebuah kebenaran yang mapan.

Rekonstruksi pemahaman rezim kuasa ini menjadi penting dalam mengembangkan model pendekatan gerakan sosial sebagai alat analisis terhadap spektrum fenomena sosial yang lebih luas. Pada era saat ini, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membaca fenomena-fenomena sosial yang terjadi di ruang-ruang digital, termasuk di dalamnya fenomena sosial keagamaan (Meyer dan Moors, 2006: 3-5). Gerakan-gerakan sosial di ruang-ruang digital dapat dideteksi melalui platform-platform yang lahir dan membawa bingkai wacana anti mainstream serta berupaya melakukan pembingkai dengan maksud memperoleh tujuan-tujuan tertentu yang dapat dilacak melalui visi dan sajian konten yang ditampilkannya. Secara spesifik, analisis ini akan mencoba menguraikan geliat wacana gender dan Islam di ruang digital melalui website *mubadalah.id* sebagai sampelnya.

Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya bahwa ada dua cabang komponen teoretis yang diaplikasikan dalam teori gerakan sosial yaitu sumber daya dan struktur mobilisasi; lalu budaya dan pembingkai serta kesempatan politik. Pada teori sumber daya dan struktur mobilisasi, ada dua poin utama yang coba dieksplorasi yaitu motif di balik lahirnya sebuah gerakan sosial dan tawaran apa yang dibawanya sebagai perbandingan; lalu mekanisme struktural yang dijalankan untuk mempertahankan solidaritas dan kontinuitas mobilisme aktivisme sosial.

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, maka ada dua hal yang perlu dieksplorasi yaitu latar belakang di balik kehadiran website yang diteliti, beserta tawaran yang dibawanya dan mekanisme pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dari mobilisme yang dilakukan. Untuk menjawab persoalan pertama, ada beberapa poin yang bisa dielaborasi. Pertama, platform *mubadalah.id* memiliki visi dan idealisme yang tidak bisa dilepaskan dari penyematan kata “mubadalah” sebagai namanya. Kata *mubadalah* sendiri merupakan terminologi teori yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir sebagai pencetusnya. Adapun penjelasan lebih detail mengenai terminologi *mubadalah* ialah sebagaimana kutipan langsung darinya (mubadalah.id, 2022: “Seputar Metode Mubadalah”):

“Mubadalah adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang-rasa. Ia juga berarti timbal-balik, resiprositi, atau kesalingan. Kata ini digunakan untuk sebuah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan, demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Tepatnya, untuk kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat. Keduanya.”

“Secara bahasa ia adalah perspektif kesalingan. Secara terminologi bisa didefinisikan sebagai “Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain”.”

Penggunaan kata *mubadalah* bahkan diakui oleh pencetusnya bahwa merupakan salah satu kata yang berkaitan erat dengan sebuah gerakan perlawanan. Metodologi yang ia usung juga berupaya menjadi konstruksi teori alternatif dalam membaca teks-teks keagamaan dengan menekankan akan relasi yang proporsional antara laki-laki dan

perempuan (Qadir, 2019). Maka bisa diasumsikan bahwa sebagai gerakan sosial, platform *mubadalah.id* lebih cenderung menekan sisi aksiologis dari wacana yang diangkat melalui tawaran pendekatan yang aplikatif. Sebagai tambahan, gerakan ini juga menjelma bentuk perlawanan atas rezim wacana yang menganggap kajian al-Qur'an sebagai sesuatu yang eksklusif dan hanya dapat diakses melalui lembaga-lembaga pengajaran Islam "resmi" serta telah mapan (Hairul, 2019: 197-213).

Kedua, jika ditilik dari mekanisme struktural yang diakomodir website *mubadalah.id*, terlihat bahwa *mubadalah.id* telah menyusun dewan redaksinya dengan sangat tersistem. Begitupun dengan pengelolaan terhadap para pendukungnya, *mubadalah.id* memberikan ruang khusus pada websitenya yang memperlihatkan nama-nama para kontributor. Selanjutnya, *mubadalah.id* juga memberikan apresiasi melalui postingan "9 Artikel Pilihan Pekan Ini" yang juga sekaligus mempertegas eksistensinya di ruang-ruang digital.

Kemudian jika objek kajian tersebut dianalisis dengan teori pembingkai dan kesempatan politik, maka ada beberapa poin yang dapat dieksplorasi. Pertama, platform *mubadalah.id* berhasil mengaplikasikan ketiga bingkai sebagaimana dikemukakan oleh Snow dan Benford (1988: 200-204) yaitu diagnostik, prognostik dan motivasional. Website *mubadalah.id* berhasil mengidentifikasi dan mendiagnosis persoalan yang menjadi fokus utama gerakannya, di mana ia melihat adanya kesenjangan antara produk-produk kajian tafsir agama untuk mampu menampilkan prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Maka sisi aksiologisnya untuk mengubah peradaban masyarakat yang tidak patriarkis menjadi lebih maksimal.

Kemudian, platform *mubadalah.id* berhasil memberikan pemecahan atas persoalan yang telah diagnosis serta strategi dan taktik yang diperlukan. Hal ini sebagaimana telah diuraikan pada analisis mekanisme struktural. Lalu, platform *mubadalah.id* juga dikatakan berhasil mengaktualisasikan mobilisasi massanya melalui aktivismenya yang konsisten menghadirkan konten-konten di media digital yang menjadi sumber daya utamanya. Keberhasilan ini juga ditunjang oleh efektivitas agen dan metode transmisi yang dimanfaatkan. Sebagaimana dikemukakan Bryks (1995: 577) bahwa kredibilitas informasi sebagian dinilai dari kredibilitas sumber, sehingga memiliki legitimasi sosial yang memiliki potensi lebih besar dalam meyakinkan masyarakat. Serta berdasarkan pengamatan McAdam, Tarrow dan Tilly (1996: 16) bahwa kontruksi budaya yang diadopsi oleh suatu gerakan kolektif hampir selalu berupa proses jaringan, maka jaringan-jaringan asosiasi yang telah dimiliki oleh masing-masing platform memberikan peluang bagi semakin masifnya gaung resonansi bingkai (*frame resonance*) dari gerakan sosial yang diinisiasinya.

Terakhir, jika ditinjau dari perspektif kesempatan politik, platform tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika "politik Islam" di era digital. Sebab sebagaimana menurut Eickelman dan Piscatori (1996: 5) bahwa pembingkai tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik atau kepentingan.

Dari Perspektif Menuju Gerakan Sosial: Kontestasi Otoritas yang Tidak Terelakkan

Analisis terhadap *mubadalah.id* sebagai gerakan sosial juga memberikan fakta bahwa adanya pergeseran yang cukup signifikan yaitu dari sebuah perspektif menuju gerakan sosial. Pergeseran ini sekaligus memberikan ruang diskusi baru mengenai sesuatu yang coba diraih oleh sebuah perspektif dalam jangkauan yang lebih luas. Di akhir uraian sebelumnya telah sempat disinggung bahwa gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik dan kepentingan. Maka secara lebih spesifik, pada bagian ini akan menguraikan kontestasi otoritas yang tidak terelakkan dalam gelanggang wacana yang terjadi di media sosial dewasa ini.

Bagaimanapun, perkembangan wacana Islam progresif di Indonesia, termasuk gender, tidak bisa dilepaskan dari geliat kebangkitan para cendekiawan muslim baru. Mereka berhasil menghidupkan semangat modernitas dalam pemikiran dalam wacana Islam yang selama ini mungkin terkesan “stagnan”. Perhatian terhadap dinamika konteks serta kebutuhan sosial masyarakat menjadi salah satu elemen penting yang selalu dipertimbangkan dalam menginisiasi lahirnya produk pemikiran baru maupun mengeritisi produk pemikiran lama yang dianggap telah kehilangan relevansinya. Meskipun hampir selalu dipastikan bahwa selalu terjadi kontestan yang menantang produk-produk pemikiran yang mereka tawarkan (Jameah, 1999: 24).

Para kontestan, dalam hal ini, di satu sisi bisa diidentifikasi sebagai “petahana” yang merupakan pemegang otoritas keagamaan tradisional seperti *kyai*, *ulama*, *da'i* maupun semisalnya. Di sisi lain merupakan pengusung wacana baru, termasuk gerakan Islam kanan, yang turut andil dalam percaturan wacana yang satu sama lain saling berproses memperkuat basis konstruksi pemikiran yang ditawarkan serta basis pendukungnya. Maka menarik untuk kemudian melakukan observasi terhadap pergulatan kontestasi otoritas yang terjadi terutama jika dikaitkan dengan perkembangan media penyebaran informasi yang tidak terlepas dari inovasi-inovasi teknologi informasi dan komunikasi (Ibrahim, 2020: 28-33).

Para cendekiawan muslim baru ini memiliki peran yang sangat masif terutama jika dikaitkan dengan perkembangan wacana-wacana di perguruan tinggi Islam. Namun sayangnya, pada level *grassroot* kiprah mereka seakan tidak dihiraukan atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mampu untuk “dicerna”. Maka pada level masyarakat tersebut, peran para “petahana” masih sangat dominan dan bahkan tidak terkalahkan. Selanjutnya, pada era saat ini, penting juga untuk mencantumkan level masyarakat “media sosial” sebagai salah satu tipologi baru yang tidak bisa dikesampingkan. Pada level masyarakat tersebut juga cendekiawan muslim baru kurang berhasil memainkan perannya dan tertinggal oleh gerakan Islam baru (kanan Islam) khususnya dalam meraih simpatisan dan audiens.

Kegagalan gerakan cendekiawan muslim baru untuk memperoleh posisi yang diakui (otoritas) pada dua kelas masyarakat tersebut bukanlah disebabkan mereka tidak otoritatif. Secara intelektual, banyak dari mereka yang otoritas keilmuannya telah mencapai level *advance* dan bahkan diakui secara internasional. Maka dalam hal ini, jika merujuk uraian Azhar Ibrahim pada “Being Authoritative but No. Authority” (2020: 28-47) didapati tiga alasan mendasar yang menyebabkannya. Pertama, adanya tuduhan atau labelisasi terhadap cendekiawan muslim baru dengan “Islam liberal” oleh para kontestannya. Labelisasi ini seakan “membunuh” aktor-aktor cendekiawan muslim baru untuk masuk dan menjalin *engagement* dengan masyarakat selain pada level akademik.

Kedua, adanya budaya di masyarakat Indonesia yang melihat otoritas keagamaan berdasarkan garis keturunan terutamanya dari keturunan pendiri pondok pesantren maupun keturunan Nabi Muhammad, “habib”. Fenomena ini menyebabkan banyak dari cendekiawan muslim baru yang “gagal” mendapatkan otoritasnya sebagai sosok yang otoritatif dalam diskursus agama sebab bukan berasal dari kalangan yang memiliki “darah biru”. Selain itu juga, cendekiawan muslim baru biasanya dianggap kurang memperlihatkan “keIslamannya” sebab kurangnya perhatian mereka terhadap penggunaan simbol-simbol keagamaan maupun gaya-gaya tradisional para *da'i* yang kerap menyampaikan materi-materi keagamaan yang tidak menghidupkan nalar di mana hal tersebut juga masih menjadi pertimbangan masyarakat akar rumput.

Ketiga, para cendekiawan muslim baru kurang terlibat dalam aktivisme-aktivisme sosial yang diinisiasi oleh para kontestannya melalui media-media yang dapat dijangkau

oleh masyarakat di luar masyarakat akademik. Seperti halnya keterlibatan dalam organisasi-organisasi pergerakan maupun diseminasi-diseminasi pemikiran maupun wacana yang bersifat umum seperti melalui media sosial. Kurang aktifnya mereka dalam melakukan upaya-upaya yang potensial untuk menyebarkan pemikiran maupun tawaran wacana keagamaan progresif yang mereka perjuangkan, juga turut memperlemah posisi mereka dalam kontestasi otoritas di level masyarakat baik *grassroot* maupun media sosial.

Beragam tantangan yang dihadapi oleh cendekiawan muslim baru juga secara otomatis berpengaruh terhadap tersebarnya wacana keagamaan progresif. Kurang optimalnya diseminasi wacana progresif selanjutnya memperkecil potensi terjadinya reformasi dalam tubuh masyarakat beragama (Islam). Wacana gender, misalnya, masih dianggap sebagai sebuah wacana yang berasal dari kepentingan “Barat” dan dibawa oleh agensi-agensinya di Indonesia (mahasiswa lulusan universitas Barat), ketimbang wacana yang mencerahkan dan salah satu cara pandang keagamaan yang harus diperhatikan khususnya dalam mengurai benang kusut patriarkisme serta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Kasus-kasus kejahatan seksual yang bahkan terjadi di ruang lingkup pendidikan keagamaan tradisional seperti pesantren memperlihatkan bahwa wacana gender masih dianggap sebagai wacana pinggiran yang tidak mendapatkan tempat dalam institusi-institusi pengajaran agama tradisional.

Sekat-sekat yang membatasi diseminasi wacana-wacana Islam progresif yang tidak bisa dipungkiri saat ini dibutuhkan kehadirannya dalam ruang-ruang sosial mulai terpankaskan dengan munculnya media-media pengarusutamaan baru. Adanya media sosial, dalam hal ini, menjadi *short-cut* dalam kapasitasnya sebagai penghubung antara *da'i* atau diseminator dengan *mad'u* atau audiens. Maka tidak mengherankan jika media sosial saat ini menjadi pusat kontestasi wacana khususnya yang berkaitan dengan wacana-wacana yang punya agenda aksiologis seperti mengubah *mindset* manusia atau masyarakat (*from science to social reform*). Terlebih intensitas pengguna media sosial saat ini semakin masif sehingga peluang ini semestinya menjadi ruang kontestasi terbaik bagi cendekiawan muslim baru untuk semakin masif mendiseminasikan wacana-wacana segarnya.

Hal tersebut nampaknya sudah mulai terlihat dari beberapa pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam pecaturan wacana gender misalnya. Pergeseran tersebut secara spesifik dapat diidentifikasi dari pembacaan terhadap *mubadalah.id* yang memperlihatkan adanya pergeseran dari sebuah cara pandang (perspektif) menuju gerakan sosial. Pergeseran ini setidaknya memperlihatkan keberhasilan jika ditinjau dari *engagement* yang berhasil diperoleh oleh *mubadalah.id* pada bagian pembahasan sebelumnya. Namun secara lebih lanjut jika fenomena ini diurai dalam kerangka pembacaan kontestasi otoritas, maka ada beberapa hal-hal lainnya yang bisa dipertegas di balik upaya yang dilakukan dan capaian *mubadalah.id* dalam “merebut” otoritas keagamaan di ruang digital khususnya dalam wacana relasi gender atau keadilan gender.

Selain dari apa yang telah diuraikan pada analisis gerakan sosial sebelumnya, nampaknya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan *mubadalah.id* berhasil melenggang sampai saat ini. Pertama, *mubadalah.id* meskipun berakar dari pendekatan *mubadalah* yang dipopulerkan oleh kalangan cendekiawan muslim baru, Faqihuddin Abdul Kodir, namun sosoknya juga dekat dengan para pemegang otoritas keagamaan tradisional seperti KH. Husein Muhammad serta karya-karyanya yang berbahasa Arab juga turut serta membangun “citra” keulamaannya. Faktor ini secara tidak langsung menancapkan kakinya pada dua sisi sekaligus; sebagai cendekiawan muslim baru dan sekaligus sebagai ulama. Posisi ini setidaknya memberikannya “kenyamanan” dalam

upaya untuk menyebarkan gagasannya sekaligus meminimalisir “gangguan” dari para kontestan lainnya. Meskipun pada saat yang sama bisa saja posisinya tersebut justru memperbesar peluangnya untuk ditekan dan dijadikan sasaran “tembak” bagi para kontestannya, sebagaimana yang terjadi pada Quraish Shihab dan Said Aqiel Siradj misalnya (Ibrahim, 2020: 33).

Kedua, sebagai seorang yang bisa diidentifikasi sebagai cendekiawan muslim baru, sosok Kang Faqih tidak seperti para pendahulunya yang terfokus pada diseminasi wacana pada level masyarakat akademik. Ia bahkan membangun jejaring dan wadah pergerakan yang mampu menjadi ruang bertemu bagi para cendekiawan muslim baru dan para “petahana” melalui KUPI (Konferensi Ulama Perempuan Indonesia) yang dihelat pertama kali pada tahun 2017. Konferensi kedua yang akan dilangsungkan tahun 2022 ini bahkan didukung secara penuh oleh sejumlah otoritas fungsional politis di Indonesia. Pada taraf ini, Kang Faqih telah membawa isu atau wacana gender dan agama (Islam) menjadi salah satu wacana yang secara politis juga harus diperhatikan dan didukung oleh para elit politik. Maka tidak heran jika *mubadalah* dan gerakan-gerakan yang mengusung keadilan gender sebagai wacana yang diusungnya mulai dianggap sebagai “rezim wacana” baru—dalam bahasa Foucault.

Jika kontestasi wacana dilihat dari kacamata Foucault (1990), maka wacana dapat dikatakan mengalami skema produksi, sebab ia dianggap sebagai sebuah sesuatu yang bergerak secara sistematis dan bertendensi politis, Proses produksi wacana setidaknya tentu memiliki tendensi untuk membentuk suatu *episteme* baru ataupun ingin menggeser suatu *episteme* lama. Maka apabila suatu wacana berhasil menyebar secara terlembaga dan langgeng—ternormalisasi, wacana tersebut bisa menjadi rezim wacana yang nantinya akan menjadi kontrol sosial bagi suatu masyarakat dan membentuk sebuah karakter sebagaimana yang telah disebutkan—sebab konsep dasar teori Relasi Kuasa Foucault ialah *disciplinary power*. Implikasinya, ada yang menjadi wacana dominan dan wacana terpinggirkan, serta terlebih lagi bahwa relasi antara pengetahuan dan kekuasaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Maka jika apa yang telah dirintis oleh Kang Faqih dan para cendekiawan muslim yang *concern* pada isu gender berhasil menjadi rezim wacana, maka proses reformasi sosial yang berkaitan dengan keadilan gender tinggal menunggu waktu. Selain itu, kiprah Kang Faqih juga sekaligus dapat dijadikan *role model* baru bagi para cendekiawan muslim baru agar mampu mengoptimalkan kiprahnya dalam menyebarkan wacana-wacana yang progresif dan memiliki daya dorong bagi kemajuan peradaban serta kemaslahatan manusia di Indonesia khususnya umat Islam sebagai komunitas agama terbesar di dalamnya.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan beberapa poin kesimpulan. Pertama, kemajuan pesat era digital telah memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia informasi dan komunikasi termasuk lahirnya *blogosphere* sebagai salah satu ruang paling masif dan efektif. Maka dalam ranah diseminasi wacana Islam, muncul sebuah istilah yang disebut *Islamic-blogosphere*, sebuah term yang mewakili dinamika kajian Islam di tengah perjumpaannya dengan budaya serba digital. Kedua, teori gerakan sosial menjadi salah satu pendekatan yang menarik untuk diaplikasikan dalam membaca gerakan-gerakan sosial kolektif yang diinisiasi oleh platform-platform media digital. Sebab, ada dua pasang elemen teoretis yang terdapat dalam teori gerakan sosial yang dapat digunakan untuk menguraikan analisis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan mobilisasi gerakan, pbingkaiian serta kesempatan politik yang berkaitan dengan kontestasi wacana.

Ketiga, platform website *mubadalah.id* sebagai sebuah gerakan sosial, merealisasikan aktivisme sosialnya yaitu melalui pemanfaatan blogosphere. Platform ini mencoba menghadirkan kajian-kajian seputar gender dengan gaya tulisan populer yang diperuntukkan sebagai penyebar narasi Islam yang ramah dan solutif dalam menjawab isu-isu gender, sehingga gerakan sosial yang dilakukan platform ini cenderung menekankan pada sisi aksiologis. Lalu, platform ini juga dapat dikatakan berhasil mengelola dan mempertahankan gerakan sosialnya dengan baik.

Keempat, *mubadalah.id* merepresentasikan adanya pergeseran dari perspektif menuju gerakan sosial yang merupakan bagian dari kontestasi otoritas di ranah sosial. Kelima, kiprah Kang Faqih menjadi *role model* baru bagi perjuangan cendekiawan muslim baru dalam upaya mendiseminasikan gagasan-gagasan serta wacana-wacana progresif yang berdampak bagi peradaban maupun kemaslahatan manusia, khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Benford, Robert D., dan David Snow. 2000. "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment". *Annual Review of Sociology*. Vol. 26. 611-639.
- Buechler, Steven M.. 1993. "Beyond Resource Mobilization? Emerging Trends in Social Movement Theory." *Sociological Quarterly* 34, 2: 217-35.
- Burgat, Francois, dan William Dowell. 1993. *The Islamic Movement in North Africa*. Austin: Center for Middle Eastern Studies, University of Texas.
- Campbell, Heidi A.. 2013. "Introduction: The Rise of Study of Digital Religion". Dalam Heidi A. Campbell (ed.). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. London & New York: Routledge.
- Eickelman, Dale E. dan James Piscatori. 1996. *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Esposito, John L. 1993. *The Islamic Threat: Myth or Reality?*. New York: Oxford University Press.
- Farmawi, 'Abd al-Ḥayy. 1977. *Al-Bidāyah Fi Al-Tafsir Al-Mawdlū'ī Dirāsah Manhajīyyah Mawdlū'īyyah*. Kairo: Maṭba'ah al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah.
- Foucault, Michele. 1990. *History of Sexuality I*. New York: Vintage Books.
- Gamson, William A. 1975. *The Strategy of Social Protest*. Homewood, Ill.: Dorsey.
- Hairul, Moh. Azwar. 2019. "Tafsir al-Qur'an di YouTube". *Al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Ibrahim, Azhar. 2020. "Being Authoritative But No Authority": Muslim Religious Intellectuals in Shaping Indonesian Islam Discourse" pada Saat Norshahril dan Ahmad Najib Burhani (ed.). *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*. Singapura: ISEAS.
- Lim, Merlyna. 2018. "Roots, Routes, Routers: Communication and Media of Contemporary Social Movements". *Journalism & Communication Monographs*. Vol. 20. No. 2. 92-137.
- Meyer, Birgit dan Annelies Moors. 2006. "Introduction". Dalam Birgit Meyer dan Annelies Moors (ed.). *Religion, Media and The Public Sphere*. USA: Indiana University Press.
- Morris, Aldon D., dan Carol McClurg Mueller (ed.). 1992. *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven: Yale University Press.

- Noakes, John A. 2000. "Official Frames in Social Movement Theory and The Egyptian Muslim Brotherhood". *Sociological Quarterly* Vol. 42, No. 4. 487-510.
- Oberschall, Anthony. 1973. *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.
- Oberschall, Anthony. 1973. *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.
- Pain, Julien. 2005. "Bloggers, The New Heralds of Free Expression". Dalam *Handbook for Bloggers and Cyber-Dissident Reposters Without Borders*.
- Parsa, Misagh. 1989. *Social Origins of the Iranian Revolution*. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Snow, David A., dan Robert D. Benford. 1988. "Ideology , Frame Resonance, and Participant Mobilization". Dalam Bert Klandermans, Hansteper Kriesi, dan Sidney Tarrow (ed.). *From Structure to Action: Comparing Movement Participation Across Culture. International Social Movement Research*. Jilid I. Greenwich: JAI Press. 197-218.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Reading, Mass.: Addison Wesley.
- Wickham, Carrie Rosefky. 1997. "Islamic Mobilization and Political Change: The Islamist Trend in Egypt's Professional Associations". Dalam Joel Beinin dan Joe Stork (ed.). *Political Islam*. Berkeley: University California Press. 120-135.
- Wiktorowicz, Quintan. 2012. "Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial". Dalam Quintan Wiktorowicz (ed.). *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial (terj.)*. 35-109.
- Williams, Rhys H., dan Robert D. Benford. 2000. "Two Faces of Collective Action Frames: A Theoretical Consideration". *Current Perspectives in Social Theory*. Vol. 20. 127-151.
- Woan, Sunny. 2008. "The Blogosphere: Past, Present, and Future. Preserving the Unfettered Development of Alternative Journalism". *California Western Law Review*. Vol. 44. No. 2. 477-510.
- Website/ Media Online**
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2016. "Seputar Metode Mubadalah". <https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>
- Jameah. 1999. "Jameah Interview with Dr. Soroush". <http://drsoroush.com/en/jameah-interview-with-dr-soroush/>